KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sejumlah daerah kesulitan air, komisi V: penanganan kekeringan jangan andalkan pola darurat
Tanggal : Minggu, 21 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sejumlah Daerah Kesulitan Air

Komisi V: Penanganan Kekeringan Jangan Andalkan Pola Darurat

SEJUMLAH daerah mulai mengalami krisis air bersih seiring meluasnya kekeringan. Padahal musim kemarau baru pada fase awal sebelum masa puncaknya pada September mendatang.

Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, pola penanganan bencana kekeringan di Indonesia masih mengandalkan bantuan darurat, tidak menyelesaikan akar masalah sebenarnya. Krisis air bersih yang terus berulang merupakan cerminan dari manajemen sumber daya air yang belum matang.

"Jadi persoalan kekeringan bukan semata-mata akibat faktor alam, tapi terkait dengan tata kelola sumber daya air yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan iklim," ujar Iwan di Jakarta, Jumat (19/6/2026)

Diketahui, berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya tiga kabupaten di Pulau Jawa mengalami krisis air bersih akibat berkurangnya ketersediaan sumber air selama musim kemarau. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat. BNPB mencatat lebih dari 1.600 warga terdampak akibat menurunnya ketersediaan air bersih di wilayah tersebut.

Iwan melanjutkan, fokus utama Pemerintah seharusnya digeser dari sekadar penanganan darurat menjadi pembangunan mitigasi yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Karena yang lebih penting adalah membangun sistem ketahanan air yang mampu mengurangi kerentanan masyarakat terhadap perubahan cuaca ekstrem.

Iwan mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak gagap dan segera menyusun kebijakan mitigasi yang berbasis pada data ilmiah. Informasi iklim yang telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah. Mulai dari pengelolaan sumber air hingga kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kemarau panjang.

Selain itu, ia mengkritik lemahnya fungsi pengawasan dan pemeliharaan terhadap sarana air bersih yang sudah dibangun di berbagai daerah. Akibatnya banyak fasilitas penunjang air bersih yang akhirnya mangkrak dan tidak dapat digunakan masyarakat saat kemarau tiba.

"Jadi ke depan pengawasan harus semakin dimaksimalkan," tandas politisi Gerindra ini.

Namun, ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung di Jawa Barat, kemudian Kabupaten Klaten, Cilacap dan Jepara di Jawa Tengah, selanjutnya Kabupaten Gunungkidul di DIY hingga Bojonegoro dan Pasuruan di Jawa Timur.

Senada, Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif dalam menghadapi kekeringan di sejumlah daerah. Mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih hingga mitigasi dampak kekeringan. Terlebih dampak musim kemarau pada tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang.

"Kekeringan yang semakin meluas harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak di berbagai sektor. Apalagi masyarakat di sejumlah daerah sudah mengalami krisis air bersih," kata Puan di Jakarta, Jumat (19/6/2026)

Menurut Puan, bantuan air bersih yang saat ini mulai disalurkan kepada masyarakat terdampak memang diperlukan. Namun, Pemerintah harus menyiapkan solusi yang lebih berkelanjutan untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berulang setiap tahun.

Ia menilai, daerah-daerah yang selama ini masuk kategori rawan kekeringan perlu memiliki sistem mitigasi yang lebih kuat, baik dari sisi penyediaan sumber air maupun pengelolaan cadangan air saat musim hujan. Seperti memanen air hujan *(rainwater harvesting)* dan membuat sumur resapan.

Puan mengingatkan, dampak kekeringan berpotensi merembet ke sektor pertanian. Hal ini sebagai akibat dari berkurangnya pasokan air sehingga mengganggu aktivitas produksi pangan dan berdampak pada para petani di sejumlah daerah.

"Pemda bersama kelompok tani harus duduk bersama untuk berdiskusi mencari pendekatan yang paling tepat karena setiap daerah belum tentu sama tantangannya," jelas politisi PDIP ini.

Puan menyebut, fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang menyebabkan musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih lama. BMKG memperkirakan musim kemarau dapat terjadi hingga tujuh bulan di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan puncak kemarau diprediksi berlangsung pada Agustus 2026.

"Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi memicu krisis air bersih, tetapi juga meningkatkan risiko kekeringan lahan pertanian hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," terang Puan. ■ TIF